

Judul : Polri Bantah Pengalihan Isu
Tanggal : Sabtu, 17 Desember 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Polri Bantah Pengalihan Isu

● FAUZIAH MURSID,
LINTAR SATRIA

Eko Patrio melaporkan tujuh media *online* yang mengutip pernyataannya.

JAKARTA — Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pengungkapan rencana aksi bom yang digagalkan oleh Densus 88 di Bekasi bukanlah upaya pengalihan isu. Hal itu disampaikan Tito menanggapi tuduhan miring sejumlah pihak yang menyatakan pengungkapan rencana aksi bagian dari upaya pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya jawab dengan tegas, ini bukan pengalihan isu. *Kenapa?* Karena, satu, saya sudah pengalaman dari tahun 1998 menangani kasus seperti ini. Rekan-rekan yang ada di Densus ini, Polri. Ini bukan sutradara. Kami tidak pernah belajar jadi sutradara," kata Tito di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (16/12).

Tito pun menyayangkan pihak yang menyatakan demikian. Menurut Tito, hal tersebut melukai kerja keras Densus 88 yang terus bergerak di lapangan dalam mengantisipasi aksi teror.

"Teman-teman berdasarkan kerja keras mereka. Kegiatan intelijen yang memonitor terus 24 jam. Kita beruntung ada kasus seperti ini kita gagal-

kan. Saya apresiasi adik-adik densus ini," kata Tito.

Menurutnya, 11 orang yang telah ditangkap berkaitan dengan aksi ini murni penegakan hukum dan hasil dari penyelidikan berbulan-bulan. Nantinya proses peradilan terkait kasus ini juga akan terbuka di pengadilan. Sehingga, masyarakat bisa melihat sendiri proses penegakan hukum para pelaku.

Terhadap pihak yang menggulirkan pengalihan isu, Tito pun meminta pihak tersebut menunjukkan bukti dan tidak hanya memberi pernyataan semata. Terlebih jika pernyataan itu disampaikan oleh pejabat publik.

"Jangan *ngomong* tanpa data, berdasarkan opini saja. Kasihan aparat kita yang bekerja keras," kata Tito.

Ia menegaskan siap bertanggung jawab jika bukti menunjukkan penangkapan tersebut sebagai pengalihan isu semata.

"Kalau ada bukti bahwa ini rekayasa, tunjukkan buktinya itu dan kita akan lakukan tindakan tegas. Saya sendiri, kalau ini rekayasa, saya siap dicopot. Apa yang kami kerjakan adalah murni dari penyelidikan berbulan-bulan mereka," katanya.

Sementara, artis yang juga anggota DPR dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi tulisan di media *online* yang mengutip pernyataannya. Di mana, di media *online* tersebut Eko disebut menyatakan bom Bekasi sebagai upaya pengalihan isu kasus Ahok.



Atas hal itu, Eko membantah pernah mengeluarkan pernyataan bahwa penemuan bom Bekasi sebagai upaya pengalihan isu kasus Ahok sebagaimana ditulis beberapa media *online*. Bahkan, anggota Komisi X DPR itu menegaskan, tidak pernah diwawancarai para wartawan media *online* tersebut.

"Jujur saja, kami atau saya secara pribadi merasa perlu mengklarifikasi. Jadi, itu ada di media *online*, tidak ada ocehan saya seperti itu, dan saya tidak pernah diwawancarai," kata Eko di gedung Bareskrim Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12).

Ia pun memastikan, pemberitaan yang ditulis tujuh media *online* tersebut adalah tulisan imajiner yang mencatut namanya. Menurutnya, tak hanya dirinya yang merasa telah dirugikan atas tulisan tersebut, tapi juga pihak kepolisian. Pasalnya, dampak

dari tulisan tersebut telah meresahkan masyarakat.

"Kita mengambil kesimpulan ini bagian dari fitnah zalim kepada saya, kepolisian, masyarakat, internal partai kami, dan teman-teman kami," ujar Eko. Karena itu, selain memberi klarifikasi terhadap pernyataan tersebut, pihaknya juga melaporkan tujuh media *online* tersebut.

"Kami juga membuat laporan dan nanti akan ditelusuri pihak mana yang mengarang bebas dan pihak kepolisian tadi setelah saya melaporkan siap akan melakukan yang terbaik," kata Eko.

Komisi III akan menyambangi Mabes Polri terkait pemanggilan anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Pemanggilan Eko terkait pemberitaan media *online*.

Sementara, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, pemanggilan terhadap Eko tersebut belum pas. Karena, jika memang ada pelanggaran, kata Masinton, seharusnya cukup dikomunikasikan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

"Karena sifatnya masih klarifikasi, seharusnya cukup dikoordinasikan dengan MKD," kata Masinton, Jumat (16/12).

Masinton mengatakan, Komisi III akan menanyakan hal tersebut ke Mabes Polri. Masinton juga meminta anggota DPR lainnya jangan membuat pernyataan atau pendapat yang prematur, apalagi yang menyangkut isu sensitif di publik.

■ ed: muhammad hafid